
DAMPAK INDUSTRIALISASI TERHADAP ASPEK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Endang Sutrisna)*

Abstract: Basically, development phenomena in Indonesian are indicated by unbalanced growth between the agrarian and industrial sector. That is not conducive for a better economic structure. Industrialization is directed for sustaining development on economic growth, creating sturdier economic structures, and production an economic sectors, support. Traditional economy can be an alternative to stimulate industrial growth for wining competition, improving industrial productinity, and boosting the local traditional economy.

Keywords: *agrarian sectors, industry, traditional economy, development.*

Pendahuluan

Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia tergolong negara-negara terbelakang. Keterbelakangan tersebut biasanya terutama dihubung-hubungkan dengan keterbelakangan di bidang ekonomi. Dan, demikian seriusnya masalah-masalah yang dihadapi sebagian besar negara-negara di dunia dibidang ekonomi tersebut sehingga semua negara-negara terbelakang itu berusaha untuk memberikan prioritas utama pada pembangunan ekonomi. Biasanya dalam bentuk "Rencana Pembangunan Lima Tahun" seperti misalnya dilaksanakan di India dan Indonesia.

Fenomena global dalam pembangunan di Indonesia khususnya di masa lalu adalah keterbelakangan di bidang ekonomi. Dalam rangka pembangunan ekonomi, sekaligus terkait usaha-usaha untuk pemerataan kembali hasil pembangunan, baik yang berupa penyebaran pelaksanaan pembangunan yang merata keseluruh daerah maupun yang berupa peningkatan pendapatan

masyarakat. Secara bertahap diusahakan mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan serta mempersempit jurang antara yang kaya dan yang miskin. Dengan kata lain pembangunan ekonomi dapat mendukung tujuan atau mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat (Bintoro Tjokroamidjojo,1983:5).

Salah satu usaha guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri. Sektor ini diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri yang maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Dengan pemahaman tersebut berarti industrialisasi merupakan satu fase dari keseluruhan pembangunan ekonomi (Charles P. Kindleberger, 1958). Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di sektor industri antara lain: Pertama yang paling sering dilakukan ialah merangsang sektor industri yang sedang tumbuh. Pada intinya pendekatan ini bersifat dualistis yakni memandang perekonomian tradisional

*) Dosen FISIP Universitas Riau

sebagai alternative yang bersaing, sambil merancang impor dengan mengingat produktivitas industri. Pendekatan kedua yang kurang sering ditempuh ialah memobilisasi sektor tradisional dalam perekonomian untuk melayani tugas industri. Dalam pemikirannya adalah bahwa rakyat yang hidup di daerah-daerah pedesaan merupakan angkatan kerja potensial. Dengan demikian kebijakan ekonomi harus berpusat pada pengendalian dan pemanfaatan sektor-sektor tradisional yang belum berkembang demi pertumbuhan dan industrialisasi.; fokusnya bukan impor dan teknologi barat (Coralie Bryant,1982;7). Mengingat pendekatan yang pertama tersebut di atas menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi, maka pendekatan pertamalah yang sering ditempuh oleh pemerintah. Di samping itu pemilihan terhadap pendekatan pertama tersebut didasari suatu asumsi, bahwa melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai refleksi dari implementasi pendekatan yang pertama diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembangunan disektor lain.

Di dalam merealisasi pendekatan yang pertama, yakni merangsang sektor industri, disesuaikan dengan perkembangan wilayah serta potensi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan aspek peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya pembangunan lainnya serta kelayakan ekonomi dan tata ruang. Dengan kata lain berbagai aspek yang menyangkut potensi daerah serta hal-hal yang mendukung kearah efisiensi pelaksanaan serta produktivitas industri

perlu diperhatikan. Dalam hubungan tersebut, maka banyak peluang bagi para usahawan untuk turut serta menanam modalnya dengan mendirikan berbagai pabrik yang memproduksi berbagai hasil industri. Oleh sebab itu berbagai industri berat dan ringan, dari industri kebutuhan rumah tangga, sampai industri kendaraan diproduksi. Dan sebagai akibatnya, selama kurun waktu PJP I income daerah naik. Dengan demikian, pembangunan ekonomi melalui prioritas industri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi daerah pada kurun waktu tersebut.

Masalah Industri Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi.

Pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjoyo (1983:1), yakni sebagai suatu perubahan sosial budaya, maka industrialisasi sebagai suatu aspek dalam pembangunan akan merubah struktur dan fungsi sosial masyarakat. Artinya industrialisasi bukan hanya mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, melainkan juga menimbulkan hal-hal lain pada kehidupan masyarakat seperti pertambahan penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat datangnya penduduk dari daerah lain yang berfungsi sebagai tenaga kerja di pabrik-pabrik, terjadi pola pergeseran ekonomi masyarakat, pergeseran dalam pola hidup serta masalah-masalah lain yang secara nyata merupakan interelasi dan akumulasi dari ketiga masalah tersebut. Yang pertama menuntut berbagai fasilitas antara lain perumahan, sarana transportasi. Sampai saat ini mengenai perumahan belum seluruhnya berhasil ditangani. Dikatakan demikian, oleh

sebab mereka yang merupakan pendatang dan berfungsi sebagai karyawan pabrik tidak diberikan fasilitas perumahan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Sedangkan untuk memiliki perumahan yang disediakan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR BTN), tebetur kepada ketidakmampuan mereka untuk mencicilnya. Oleh sebab itu timbul inisiatif dari sebagian warga masyarakat khususnya mereka yang berduit untuk membangun perumahan sederhana yang seterusnya disewakan kepada karyawan pabrik. Namun karena pembangunannya tidak ditata dengan baik maka pada akhirnya menyebabkan terjadinya lingkungan yang kumuh. Di samping itu pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut pula sarana transportasi dengan demikian memberikan peluang bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan angkutan. Namun karena sarana lain seperti jalan belum ditata sedemikian rupa, maka menimbulkan semakin semrawutnya lalu lintas di daerah. Yang kedua, mengandung konotasi bahwa dengan adanya pabrik-pabrik yang dibangun menyebabkan terjadinya perubahan pekerjaan dari sebagian besar warga masyarakat (terutama yang tinggal di pedesaan) dari pekerjaan sebagai buruh tani menjadi buruh bangunan. Namun karena pekerjaan ini tidak berjalan lama, maka pada akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Untuk menjadi karyawan pabrik tidak diterima oleh sebab skill yang mereka miliki tidak sesuai dengan yang diperlukan, sedangkan untuk kembali kepada pekerjaan yang lalu tidak mungkin oleh sebab hilangnya sebagian besar kawasan pertanian sebagai akibat perluasan industri yang memakan sebagian besar

tanah kawasan pertanian di daerah. Yang ketiga, lebih cenderung dikatakan sebagai pola hidup konsumtif. Skenarionya bermula dari adanya pembangunan pabrik-pabrik yang tidak sedikit memerlukan lahan untuk pembangunannya. Untuk itu maka sebagian besar usahawan membelinya dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan karena tanah tersebut sangat diperlukan, maka tidak jarang mereka membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Situasi tersebut merubah kondisi masyarakat secara drastis. Mereka yang dahulunya hidup biasa-biasa saja tetapi karena mendapatkan rejeki nomplok dari penjualan tanahnya, maka dengan serba cepat mereka merubah pola hidupnya dengan pola hidup mewah yang bersifat konsumtif. Misalnya saja dikalangan masyarakat sudah populer istilah kredit, padahal sebelumnya tidak pernah mereka kenal. Kredit tersebut bukan hanya untuk memiliki barang-barang rumah tangga yang berukuran kecil, tetapi juga sampai kepada pemilikan kendaraan beroda dua bahkan beroda empat, sehingga sampai saat ini di lingkungan masyarakat (pedesaan) yang dahulunya sepi dan tidak ramai atau bising oleh gaungnya kendaraan bermotor, maka sekarang justru sebaliknya. Anggota masyarakat (pedesaan) sudah biasa berpergian menggunakan kendaraan angkutan yang sengaja disediakan untuk angkutan ke lokasi di mana mereka tinggal. Di samping itu ada pula mereka yang menggunakan kendaraan ojeg atau bahkan kendaraan bermotor roda empat milik sendiri. Tentunya situasi yang seperti yang digambarkan tersebut di atas dapat dipandang sebagai kemajuan. Namun, apabila ditelaah ada beberapa

hal dari kondisi itu seperti itu yang dianggap merugikan oleh sebab hanya menguntungkan mereka dalam waktu yang relative singkat. Mereka menikmati pola hidup seperti itu tidak langgeng oleh sebab hanya mereka nikmati selagi uang yang diperoleh dari penjualan tanah masih ada. Dan setelah uang mereka habis, mereka mulai merasa ada kesulitan yang pada hakekatnya bertumpu kepada masalah bagaimana menyambung hidup selanjutnya. Memang hal ini tidak dirasakan oleh semua warga masyarakat, karena ada sebagian dari mereka yang memanfaatkan uang hasil penjualan tanahnya, mereka belikan lagi tanah di daerah lain yang kadang-kadang memperoleh nasib baik karena dapat membeli tanah lebih luas dari yang dimiliki semula. Di samping itu ada pula dari mereka yang setelah ada di tempat lain menambah kegiatan dengan berdagang kecil-kecilan. Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah warga masyarakat yang mendapat uang penggantian dari tanah dan rumahnya yang tidak begitu besar dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Adapun pekerjaan yang mereka inginkan adalah sebagai tenaga kerja di pabrik yang semakin hari semakin populer. Artinya menjadi tatanan nilai baru sehingga menurut mereka mejadi tenaga kerja di pabrik dipandang lebih baik dari pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Uraian tentang dampak industrialisasi seperti dijelaskan di atas, tentunya belum menggambarkan keseluruhan yang terjadi. Artinya masih banyak hal-hal lain yang memang belum dapat disajikan dalam tulisan ini. Apalagi dengan krisis ekonomi saat ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun dalam makalah ini penulis tidak memasukkan dampak krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Walaupun demikian, kiranya beberapa masalah tersebut dapat dianggap sebagai masalah-masalah yang penting ditinjau dari kondisi sosial ekonomi maupun geografis. Daerah-daerah yang cukup pesat pertumbuhan industrinya antara lain: Tangerang, Bekasi, Kerawang, Bogor, terutama dengan peranannya sebagai penyanggah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Analisis Pendekatan Terhadap Pemecahan Masalah.

Daya penggerak untuk proses-proses perubahan dalam suatu masyarakat berasal dari dua sumber baik secara internal maupun eksternal sebagaimana disampaikan oleh Raymond Firth. Secara internal adalah daya gerak yang berupa pendapatan-pendapatan baru di lapangan teknik, perjuangan-perjuangan perseorangan untuk memperoleh tanah dan kekuasaan, perumusan baru dari faham-faham orang-orang kritis yang dianugerahi bakat-bakat istimewa, tekanan jumlah penduduk atas mata pencaharian, dan barangkali perubahan-perubahan iklim. Kelompok-kelompok kekeluargaan dapat musnah dan tanah-tanah serta hak-hak istimewanya diwariskan menurut prinsip-prinsip yang diakui disitu; terbentuk dengan jalan percabangan dan pemecahan hubungan keluarga; hak-hak istimewa bertukar pemilikinya karena kegagalan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban atau sebagai akibat pemberontakan yang tidak berhasil; bahkan adat istiadat ditiadakan dengan persetujuan karena adat istiadat tadi adalah terlalu berat atau karena inisiatif

seseorang pemimpin yang berkemauan keras. Perubahan secara eksternal, untuk sebagian terdapat dalam lingkungan pergaulan itu sendiri dan untuk sebagian lagi terletak dalam kekuatan ekspansi peradaban. Apabila diperhatikan, maka kita melihat banyak faktor yang menggerakkan perubahan di dalam masyarakat. Mungkin, apa yang uraikan oleh Raymond Firth di atas barulah sebagian, namun demikian faktor-faktor tersebut mungkin dapat dirangkum dalam suatu batasan (kecuali yang merupakan sebab dari alam) bahwa faktor yang menjadi penggerak perubahan masyarakat itu adalah gagasan-gagasan, ide-ide atau keyakinan-keyakinan dan hasil-hasil budaya berupa fisik. Jadi, apabila Alvin L Bertrand berpendapat bahwa awal dari perubahan itu adalah komunikasi, yaitu proses dengan mana informasi disampaikan dari individu yang satu kepada individu yang lain. Maka yang dikomunikasikan itu tidak lain adalah gagasan-gagasan, ide-ide, atau keyakinan-keyakinan maupun hasil budaya yang berupa fisik itu.

David C McClelland menyatakan bahwa impulse (dorongan) yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan modernisasi adalah virus mental, yaitu suatu cara berfikir tertentu yang lebih jarang dijumpai tetapi apabila terjadi pada diri seseorang, cenderung untuk menyebabkan orang itu bertingkah laku secara giat. Virus mental ini diberi nama yang aneh yakni, n Ach- singkatan dari need for Achievement (kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi). Apabila konsepsi ini dikaji, maka hasil dari virus mental n Ach ini tidaklah lain dari ide-ide, gagasan-gagasan, atau keyakinan-keyakinan maupun hasil-hasil budaya berupa fisik. Margono Slamet dalam

kosepsinya tentang macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan, antara lain adalah kekuatan pendorong (motivational forces), kekuatan mana terdapat dalam masyarakat dan bersifat mendorong orang-orang untuk berubah. Hal ini dinilai sebagai kondisi atau keadaan yang penting sekali, oleh karena tanpa adanya kekuatan tersebut orang tidak akan berubah. Kekuatan ini berasal dari segala aspek situasi yang merangsang kemauan untuk melakukan perubahan.

Deskripsi dari Margono Slamet walaupun membicarakan kekuatan pendorong, tetapi haruslah dipandang sebagai suatu stimulus yang mendorong terjadi perubahan, oleh karena keempat faktor tersebut memang sebagai faktor yang mendorong terjadinya perubahan.

Deskripsi dari firth, kelihatannya tidak saja mempersoalkan stimulus-stimulus yang mendorong perubahan dalam masyarakat, akan tetapi sekaligus membicarakan mengenai faktor yang mengalami perubahan. Apabila ditelaah kembali, maka faktor yang mengalami perubahan itu dapat saja mengenai kelompok-kelompok, nilai-nilai (adat-istiadat) dan pola perilaku. Perubahan dalam masyarakat tidak terjadi dalam satu bidang secara khusus, namun adakalanya terjadi pada beberapa bidang secara serempak, atau perubahan pada atau aspek tertentu, mempunyai pengaruh pada aspek lainnya. Neil J Smelser, dalam modernisasi hubungan-hubungan sosial, telah melakukan suatu deskripsi tentang perubahan sosial sebagai konsekuensi dari pembangunan (perubahan berencana) ekonomi, yang meliputi perubahan hubungan kerja, perubahan hubungan kekerabatan dan

perubahan hubungan-hubungan komuniti.

Pada dasarnya perubahan di dalam masyarakat menyangkut dua bentuk umum, yaitu (1) perubahan struktural, dan (2) perubahan proses. Perubahan struktural menyangkut perubahan yang sangat mendasar dan seringkali melibatkan reorganisasi unsur-unsur dari kehidupan masyarakat. Misalnya, petani yang dulu tidak menggunakan pestisida, sekarang menggunakan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Demikian pula dengan penggunaan bibit unggul, pupuk, dan alat-alat modern pertanian dapat dikategorikan ke dalam tipe perubahan ini. Berbeda dengan tipe perubahan structural, perubahan proses tidak menyangkut perubahan mendasar. Perubahan ini hanyalah berupa modifikasi dari perubahan dasar yang pernah terjadi. Sebagai contoh apabila petani yang pada mulanya menggunakan endrin sebagai pestisida, maka kini petani menggunakan pestisida lainnya yang tidak beracun bagi hewan piaraan dan manusia, seperti diazinon. Penggunaan pupuk buatan pabrik untuk menggantikan pupuk organic (kompos, menur, dan lain-lain) dapat juga digolongkan sebagai perubahan proses.

Fiedrich mengatakan, bahwa dengan adanya pembangunan akan memberikan peluang bagi timbulnya aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Namun apabila aspek-aspek negatif dari pembangunan itu dibiarkan, tentunya bukan merupakan suatu keputusan yang bijaksana oleh sebab itu akan merugikan kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan itu sebenarnya merupakan suatu konsep yang normative, ia menyiratkan pilihan-pilihan tujuan mencapai apa yang disebut sebagai

realisasi potensi manusia (Coralie Bryant 2000:3). Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah mengandung pilihan-pilihan terbaik sesuai dengan kondisi kehidupannya.

Dengan memperhatikan beberapa konsep pembangunan tersebut serta paradigma pembangunan Indonesia yang menekankan kepada aspek manusia, maka pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berwawasan kemanusiaan. Dengan kata lain menurut D.C.Korten disebut sebagai pembangunan dimensi kerakyatan (1988:261). Adapun konsep pembangunan berdimensi kerakyatan itu adalah merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

A. Peran Serta Swasta Dalam Pembangunan Perumahan

Di atas telah dikemukakan, bahwa industrialisasi dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Oleh sebab itu sebagai konsekuensinya jumlah penduduk semakin meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi seperti ini jelas menuntut pemenuhan berbagai fasilitas seperti perumahan, transportasi dan lain-lain. Karena setiap perusahaan tidak menyediakan fasilitas perumahan bagi karyawannya, sedangkan untuk memiliki perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara terbentur kepada ketidakmampuan mereka untuk mencicilnya, maka hal tersebut mendorong tumbuhnya rumah-rumah

sewaan yang tidak tertata dengan baik dan menimbulkan terjadinya daerah-daerah kumuh. Oleh sebab itu dalam mengatasinya mengikutsertakan pihak swasta terutama mereka yang mau membangun perumahan yang layak namun terjangkau oleh mereka yang tergolong lemah. Dengan demikian melalui upaya tersebut diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan perumahan bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah dengan tidak menimbulkan eksekusi lain seperti terjadinya kumuh yang dialami saat ini. Selanjutnya, sejalan dengan itu pertambahan jumlah penduduk yang menuntut sarana transportasi. Untuk mengatasinya perlu adanya penambahan sarana transportasi serta penataan jalur-jalur lalu lintas seperti perluasan jalan. Di samping itu perlu sarana angkutan yang menjangkau daerah-daerah pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk mengatasi masalah-masalah sebagai dampak industrialisasi, dapat ditinjau melalui teori di bawah ini:

Teori Keseimbangan Agraris-Industrial Dalam Pembangunan Nasional.

Gunawan Satari, selaku sekretaris Eksekutif Menristek, menerima utusan para petani. Mereka mengemukakan keluhan yang mendasar dalam berjalannya pembangunan pertanian dewasa ini. Dikatakan oleh mereka bahwa setiap ada perencanaan suatu blok lahan untuk industri, pemukiman, dan sebagainya, lahan-lahan itu dibeli orang-orang dalam rangka spekulasi. Terus berpindah tangan, padahal pabrik belum berdiri. Petani sudah kehilangan lahan sehingga produksi pertanian merosot, sedangkan gantinya ialah

produksi industri belum beroperasi. Seandainya pabrik akhirnya didirikan, ternyata yang diserap adalah tenaga wanita yang berupah murah, rupanya sebagai pengimbang akan harga lahan yang sudah membumbung tinggi. Akibatnya, dengan hanya tenaga wanita yang diserap meningkatlah kriminalitas. Keluhan mereka adalah mengenai kebijakan nasional, di mana kebijakan tersebut menetapkan pengalokasian segala dana dan daya yang antagonis yaitu sektor pertanian dan sektor industri yang berlawanan. Hal ini adalah konsekuensi dari berubahnya strategi pembangunan nasional yang shift ke industrialisasi sebagai penghelai pembangunan dimulainya PJP II.

Kasus para utusan petani itu menunjukkan bahwa shift strategi nasional ternyata pada permulaannya sudah menunjukkan gejala-gejala trade off antara pembangunan agraris ke industrial. Tentu bukan strategi nasional itu yang harus dirubah, namun ada sesuatu hal yang perlu disempurnakan, sehingga shift ini berjalan mulus tanpa trade off. Rupanya kembalinya Indonesia mengimpor beras pada tahun 1994 sebanyak 2 juta ton tidak terlepas dari trade off itu. Solusinya terletak pada imbalan kapitalisasi antara sektor agraris dan sektor industri. Maka perlu diperhitungkan hal-hal yang baru selain hal-hal yang baku seperti efficiency return to capital. Bila kita mulai dengan konstelasi kapitalisasi yang berlaku sekarang, maka dengan teori keseimbangan ini, dapat ditetapkan berapa kapitalisasi harus shift dari industri ke agraris, guna memperoleh kekuatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Tinjauan Terhadap Teori Agricultural Development.

Mellor adalah seorang ekonom pertanian yang pertama kali berhasil meletakkan peranan sektor pertanian dalam keseluruhan pembangunan ekonomi suatu negara. Adapun teori perkembangan pertanian sebagaimana dirumuskannya merupakan perasaan dari segala macam situasi dan kondisi pertanian yang terdapat di dunia ini seperti kondisi fisik, variabilitas regional, keperluan input, kemungkinan-kemungkinan output, perolehan (return) dari input. Suatu teori perkembangan pertanian harus meliputi hal-hal tersebut diatas yang demikian luas variabilitasnya, sehingga perlu ditunjang oleh pengkatalogan peranan sektor pertanian pada keseluruhan pembangunan ekonomi nasional, teori pertumbuhan tahapan yang memprioritaskan pertanian, dan model-model matematis yang disederhanakan dari perkembangan pertanian. Dalam penyusunan teorinya Mellor merumuskan peranan kunci dari transformasi ekonomi, ialah transformasi dari agraris ke industrial. Dalam proses itu pertanian terus menciut karena beberapa sebab, antara lain peningkatan spesialisasi pekerjaan, elastisitas rendah terhadap hasil-hasil pertanian, biaya transportasi yang mahal, dan ketidak konsistenan dalam hubungan input-output yang normal. Dalam proses ini perlu diperhatikan (1) ada shift relatif dalam hal tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri; (2) terciptanya pekerjaan non-pertanian didaerah perkotaan memerlukan kapital besar; (3) penduduk sektor pertanian yang banyak itu merupakan pasar bagi hasil-hasil industri; dan (4) produktivitas yang tinggi dari sektor pertanian yang memerlukan input

dari sektor lain. Maka Mellor menegaskan bahwa teori perkembangan pertanian harus meliputi hal-hal sebagaimana diperinci itu. Maka inti teori Mellor adalah: penciutan sektor pertanian, pilihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor-sektor ekonomi lain, dan penyediaan pangan oleh sektor pertanian. Untuk itu semua diperlukan capital, baik untuk sektor non pertanian, maupun untuk sektor pertanian itu sendiri. Namun, kita sangat tercengang, bahwa untuk kapitalisasi itu Mellor sampai kepada kesimpulan bahwa imbang tukar (*Term of Trade*) harus memburu ke sektor pertanian. Dapat kita baca bahwa perdagangan itu berlatar belakang kepada *propensity to save* yang lebih besar di sektor perkotaan daripada di desa, maka akumulasi capital harus terjadi di kota, yang diperlukan untuk menciptakan kerja non-pertanian disektor perkotaan. Namun ia menyatakan bahwa pada pembangunan pertanian tahap-tahap pertama imbang tukar tidak memburuk ke sektor pertanian, hanya pada tahap-tahap lanjut. Pada tahap lanjut, memburuknya imbang tukar ke sektor pertanian itu bisa merupakan problem ekonomi sebagai suatu masalah, maka dalam hal ini perlu di tanggulangi oleh kebijaksanaan pemerintah.

Teori Mellor yang kesemuanya ditunjang dengan hukum-hukum ekonomi yang dampaknya sudah diketahui. Namun teorinya itu banyak mengandung kealpaan, sehingga tidak mencerminkan realita. Pembangunan pertanian di Indonesia yang suda cukup lanjut ini ditandai dengan hal-hal yang sebaliknya : (1) tenaga dari sektor pertanian tidak ditampung di ekonomi sektor perkotaan yang normal, akan tetapi ditampungnya

pada sektor informal. Mellor sama sekali asing dengan sektor informal ini; (2) produksi pangan mandeg, karena lokasi SDA (lahan dan air) beralih ke sektor industri; (3) Imbang tukar yang memburuk ke sektor pertanian sudah terjadi sejak jaman kolonial, dan dampaknya sangat fatal, ialah tiadanya insentif bagi para petani untuk benar-benar meningkatkan produksinya.

Meninjau Keadaan Ekonomi Internasional dan Nasional.

A. Ekonomi Internasional

Baik di dalam Ekonomi pembangunan maupun di dalam sosiologi pembangunan, antara lain Todaro dan Goldthorpe, melukiskan keadaan dunia yang terbelah, ialah kelompok utara dan kelompok selatan, dengan karakteristik ketergantungan selatan kepada utara, jurang yang semakin menganga, namun kedua dunia itu berada dalam keterkaitan dan kontak kebudayaan, antara lain sebagai akibat dari keajaiban-keajaiban di dalam teknologi komunikasi. Adapun yang menjadi perhatian pokok adalah jurang yang terus menganga itu, bahkan menjadi lebih menganga, meskipun kedua dunia itu memperoleh kemajuan. Terhadap fakta-fakta ini orang menjadi tidak puas dengan teori tahapan-tahapan kubu Rostow-Harrod Dommar, dan beralih ke kubu Internasional Strukturalis. Pesan utama dari kubu itu adalah bahwa kemiskinan-keterbelakangan, kebodohan pada dunia ketiga itu adalah akibat dari dominasi utara terhadap selatan, dimana selatan tidak dapat mengelakkannya. Karena itu teorinya adalah teori pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap kemajuan.

B. Ekonomi Nasional

Dalam kurun PJP I Indonesia dinilai menduduki ranking atas dalam kinerja pembangunan ekonomi seperti: laju pertumbuhan ekonomi (6,5%); peralihan ekspor migas non-migas sebagai tumpuan pembangunan ekonomi, pengurangan jumlah kemiskinan. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Sagir dan Dillon, banyak hal-hal yang kurang menggembirakan yaitu kesenjangan antar sektor, antar golongan dan antar wilayah, penciptaan kesempatan kerja yang belum maju, infrastruktur, inflasi. Disamping itu Dillon mengemukakan gejala-gejala tumpang tindih sebagaimana disinyalir oleh Drucker, ialah tumpang tindih antara sektor primer dan sekunder yang memerosotkan harga-harga ekspor pertanian, dan tidak imbangnya antara industrialisasi dan penyerapan tenaga kerja. Gejala-gejala itu antara lain dikemukakan oleh Pancar Simatupang, bahwa di Negara kita ini sudah terjadi perubahan struktur GDP, tapi tidak terdapat perubahan penyerapan tenaga kerja : sektor pertanian masih tetap dominan dalam penyerapan tenaga kerja, padahal pangsa GDP-nya sudah beralih ke sektor-sektor lain.sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang diperas oleh se ktor-sektor lain. Untuk mengatasinya Sagir mengemukakan realokasi kredit, sedangkan Sajogyo mengemukakan penguatan kelembagaan, terutama lembaga di pedesaan seperti di LKMD di dalam merencanakan pembangunan desa. Jelas bahwa kedua argumentasi tersebut yaitu antara ekonom dan sosiolog adalah saling melengkapi.

Kesimpulan

Dari analisis beberapa pendekatan terhadap pemecahan masalah, maka di bawah ini penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya setiap masyarakat dalam hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan itu akan dapat diketahui, apabila dilakukan perbandingan, artinya adalah menelaah keadaan suatu masyarakat pada waktu tertentu dan kemudian membandingkannya dengan keadaan masyarakat itu pada masa yang lalu. Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus menerus, artinya bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan itu, akan tetapi perubahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama, ada masyarakat yang mengalaminya lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Perubahan-perubahan dalam masyarakat menyangkut hal yang kompleks.
- b. Upaya mengatasi masalah-masalah sebagai dampak industrialisasi perlu dilakukan, oleh sebab interelasi dan akumulasi dari masalah-masalah tersebut sangat merugikan kehidupan masyarakat. Disamping itu hal tersebut sesuai dengan tuntutan makna pembangunan itu sendiri, yakni harus meningkatkan kualitas manusia, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan
- c. Sesuai dengan paradigma pembanguana yang berorientasi kepada manusia, maka solusi terhadap masalah-masalah yang

terjadi sebagai dampak industrialisasi harus sesuai dengan kondisi serta kapabilitas manusianya, misalnya dengan menghidupkan kembali industri kecil, seperti industri rumah tangga, industri kerajinan tangan dan lain sebagainya.

- d. Penetapan industri sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi, pada kurun PJP I dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun bersamaan dengan itu terjadi pula masalah-masalah lain sebagai dampaknya seperti bertambahnya penduduk yang cukup tinggi dan menuntut berbagai fasilitas seperti perumahan dan sarana transportasi serta hilangnya sebagian pekerjaan penduduk terutama mereka yang tinggal di pedesaan.

Daftar Kepustakaan

- Bryant, Coralie, 2000, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES.
- Kindell Berger, Charles, 1976, *Economic Development*, Tokyo: The Mc. Graw Hill Book Company Inc.
- Korten, David, 1999, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, Sondang, 1988, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Soewardi, Herman, 2000, *Kontemplasi dan Realita*, Bandung: UNPAD Press.
- Taneko, Soleman, 1990, *Struktur dan Proses Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1989, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.